



SEKOLAH PEREMPUAN SEBAGAI MEDIA PEMBERDAYAAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

Erika Agung Mulyaningsih¹, Kolifah², Niken Kinesti³, Pepin Nahariani⁴

^{1,2,3,4}STIKES PEMKAB Jombang, Indonesia

Email: rieka22@gmail.com

Corresponding Author: Erika Agung Mulyaningsih

DOI: 10.30829/pema.v3i2.3935

ABSTRAK

Indonesia menempati peringkat ke-87 dari 146 negara di dunia dalam hal pemberdayaan perempuan. Pada aspek kesehatan reproduksi, perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan serius seperti tingginya angka kematian ibu, penyakit menular seksual, kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, serta dampak ketidaksetaraan gender. Program Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi melalui inisiatif "Sekolah Perempuan." Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam 12 pertemuan, dengan narasumber yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; DPPKB PPPA Kabupaten Jombang; akademisi; Women Crisis Center; serta Yayasan Pesantren Srikandi. Program ini berlangsung di Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dari tanggal 4 Juni hingga 31 Juli 2024, dan diikuti oleh 24 peserta yang terdiri dari kader, ibu rumah tangga, karyawan swasta, serta wirausahawan yang tertarik mengikuti kegiatan ini. Hasil program menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki sikap positif yang signifikan dibandingkan sikap negatif, serta mayoritas peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang tinggi terkait kesehatan reproduksi. Temuan ini mengindikasikan bahwa "Sekolah Perempuan" dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan reproduksi. Kegiatan ini juga berpotensi menjadi metode yang efisien untuk memperluas akses pengetahuan, meningkatkan keberdayaan, mendorong kesetaraan gender, serta memberikan ruang bagi partisipasi aktif perempuan dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi.

Kata Kunci: Sekolah Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan Reproduksi

ABSTRACT

Indonesia ranks 87th out of 146 countries globally in terms of women's empowerment. In the area of reproductive health, Indonesian women still face significant challenges, including high maternal mortality rates, sexually transmitted diseases, gender-based violence, child marriage, and the broader impacts of gender inequality. This community service program aims to provide education through the "Sekolah Perempuan" (Women's School) initiative. The program was conducted over 12 sessions, with speakers from the East Java Provincial Office for Women's

Empowerment, Child Protection, and Population; DPPKB PPPA Jombang Regency; academics; the Women's Crisis Center; and Yayasan Pesantren Srikandi. The initiative took place in Balongbesuk Village, Diwek District, Jombang Regency, from June 4 to July 31, 2024, and involved 24 participants, including community health workers, housewives, private employees, and entrepreneurs who were interested in participating. The program results indicated that most participants showed a significantly positive attitude compared to negative ones, with the majority also demonstrating a high level of knowledge regarding reproductive health. These findings suggest that the "Sekolah Perempuan" can serve as an effective means of empowering women in the area of reproductive health. Moreover, the program has the potential to be an efficient method for expanding access to knowledge, enhancing empowerment, promoting gender equality, and providing a platform for active participation in improving women's reproductive health.

Keywords: Women's School, Women's Empowerment, Reproductive Health

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, presentase penduduk perempuan dan laki-laki hampir setara, perempuan berada di angka 49,74% dan laki-laki 50,26%, akan tetapi sampai saat ini masih terdapat kesenjangan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dalam hal teknologi informasi maupun berbagai bidang lainnya (Kemenpppa, 2019). Disampaikan dalam Badan PBB untuk pemberdayaan perempuan, menyampaikan Laporan Kesenjangan Gender Global bahwa dalam hal Pemberdayaan Perempuan, Indonesia berada di posisi ke 87 dari 146 negara di dunia (Antara News, 2024). Kesetaraan gender dan peningkatan kualitas perempuan merupakan amanat yang harus disuarakan mengingat dampak dari kesenjangan tersebut memiliki pengaruh jangka panjang yang merugikan individu, keluarga dan Masyarakat serta negara. Pemberdayaan perempuan memberikan hak bagi perempuan untuk berkesempatan mengakses sumber daya, ekonomi, sosial politik dan budaya yang hal ini penting bagi perempuan untuk percaya diri dan dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri (Nur, 2019). Upaya pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mendukung kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan; Meningkatkan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, termasuk perdagangan orang; dan Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengarusutamaan gender serta melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan (Kemenpppa, 2019).

Masalah kesehatan perempuan di Indonesia masih menunjukkan fakta-fakta yang memperhatikan, seperti tingginya angka kematian ibu, derajat kesehatan yang rendah, tingginya kekerasan pada perempuan, kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi serta perkawinan anak (Kusmiran, 2012). Kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh pasangan menyebabkan berbagai masalah fisik, psikologis dan juga dampak kesehatan reproduksi yang buruk (Mulyaningsih et al., 2023). Pada kelompok remaja, ketidakberdayaan perempuan juga berakibat pada tertularnya infeksi menular seksual, dan hal ini berpotensi meningkatkan morbiditas di bidang kesehatan reproduksi (Mulyaningsih, Argaheni, et al., 2024). Cita-cita mencapai SDGs menjadi semakin sulit untuk dicapai karena ketidaksetaraan gender (KPPPA, 2022). Pendidikan merupakan sektor penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kebrdayaan perempuan, seringkali perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan setara, seolah tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan haknya secara formal, tetapi upaya meningkatkan Pendidikan dapat dilakukan melalui langkah-langkah informal, salah

satu yang digerakkan adalah Sekolah Perempuan yang merupakan program bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan DPPKB PPPA Kabupaten Jombang. Sekolah Perempuan merupakan model pemberdayaan perempuan di akar rumput. Tujuan utama model pemberdayaan ini adalah mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis, kecakapan hidup, solidaritas dan pembelajaran sepanjang hayat sehingga perempuan peserta Sekolah Perempuan dapat menjadi pemimpin perubahan sosial di lingkungan mereka. Para pemimpin perempuan ini memperjuangkan kesetaraan gender dan perdamaian di keluarga, komunitas dan mendorongnya dalam kebijakan pemerintah di tingkat desa hingga kabupaten.

Perempuan seringkali menjadi korban tidak terpenuhinya hak-hak Kesehatan reproduksi dan seksual termasuk dalam pernikahan, masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan akses kontrasepsi, tidak berani merencanakan jarak dan jumlah anak, serta terdapat paksaan-paksaan seksual. hal ini membawa dampak buruk juga bagi masyarakat karena adanya pernikahan anak, khitan perempuan yang seolah-olah di banyak tempat hal tersebut menjadi suatu yang wajar dengan berbagai alasan. Terdapat banyak perempuan yang belum memahami hak-hak reproduksinya (UN Women, 2021). Penting untuk memberikan pendidikan ataupun konseling mengenai hak-hak reproduksi perempuan (Zakaria et al., 2020). Permasalahan kesehatan reproduksi sangat kompleks, tidak hanya upaya kuratif untuk menyelesaikan kasus-kasus kesehatan reproduksi, fenomena masalah kesehatan reproduksi di Masyarakat memerlukan upaya promosi kesehatan yang berkesinambungan dan bekerjasama dengan berbagai pihak, baik perangkat pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi maupun tokoh-tokoh penting yang ada di Masyarakat.

International Conference on Population and Development tahun 1994 di Kairo merupakan tonggak Sejarah bagi kesehatan reproduksi yang saat itu dihadiri oleh 179 negara ada hak-hak seksual dan reproduksi yang ditetapkan diantaranya: Hak untuk mendapat informasi dan pendidikan. Adapun maksud dari pernyataan tersebut adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan seorang maupun keluarga. Sekolah Perempuan ini adalah sebagai salah satu sarana memberikan hak-hak perempuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan, setiap perempuan berhak untuk dibebaskan dari risiko kematian karena kehamilan, dengan demikian pemberian informasi dan edukasi mengenai hak-hak seksual dan reproduksi akan berkontribusi bagi peningkatan kesadaran perempuan dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi, baik bagi perempuan maupun bayi yang dilahirkannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, upaya memberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi kepada Masyarakat merupakan bagian dari pemenuhan hak perempuan. Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Sekolah Perempuan merupakan wadah bagi pemberdayaan perempuan, dan memberikan berbagai informasi termasuk diantaranya adalah kesehatan reproduksi perempuan.

METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melibatkan Lembaga Pemerintah, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sinergi ini dilakukan untuk memberikan banyak manfaat bagi peserta kelas sehingga mendapatkan berbagai pengetahuan yang

beragam. Sekolah Perempuan melibatkan para peserta untuk menentukan jadwal kegiatan, koordinasi dilakukan melalui grup Whats App sehingga kehadiran peserta hampir selalu mendekati 100%.

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Sekolah Perempuan:

No	Tanggal	Kegiatan
1	4 juni 2024	Orientasi, harapan dan kekhawatiran
2	15 juni 2024	Citra Diri, Kesetaraan Gender
3	20 Juni 2024	Hypnoparenting
4	29 Juni 2024	Kesadaran Kritis dan Pemberdayaan perempuan
5	6 Juli 2024	Public Speaking
6	13 Juli 2024	Belajar menulis
7	17 Juli 2024	Materi Kewirausahaan
8	18 Juli 2024	Praktik Kewirausahaan
9	24 Juli 2024	Mental Health for Women
10	26 Juli 2024	Hak-Hak Reproduksi
11	29 Juli 2024	Persiapan kehamilan sehat
12	31 Juli 2024	Persiapan study tour

Kegiatan sekolah perempuan yang dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dari DPPKB PPPA Kabupaten Jombang, akademisi, Women Crisis Center, Yayasan Sekolah Srikandi dan juga berbagai relawan yang berkomepeten untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan Desa Balongbesuk sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Kegiatan dilaksanakan bertempat di Gedung Serba Guna Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, kegiatan dimulai 4 Juni 2024 sampai 31 Juli 2024. Pelaksanaan diikuti oleh 24 peserta, terdiri dari kader, ibu rumah tangga, karyawan swasta dan wiraswasta yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun penetapan waktu dilaksanakan secara musyawarah oleh seluruh peserta, sehingga setiap pertemuan dihadiri oleh hampir seluruh peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Perempuan yang sudah dilaksanakan di berbagai tempat, memberikan banyak *best practice* untuk pemberdayaan, meskipun pada praktiknya tidak dapat menjangkau banyak perempuan di desa, tetapi mereka yang berkesempatan mengikuti Sekolah Perempuan diharapkan dapat menjadi agen dalam peningkatan pemberdayaan perempuan di desa. Sekolah Perempuan adalah bentuk pemberdayaan di akar rumput, dapat dipahami karena tidak mungkin untuk menjangkau seluruh individu di Masyarakat, sehingga para peserta Sekolah Perempuan dapat menjadi agen perubahan penting di masyarakat khususnya bagi kaum perempuan. Melalui pemberdayaan, akan mengembangkan kapasitas dan kualitas perempuan dalam berbagai bidang seperti kepemimpinan, kemampuan untuk berpikir kritis, kesadaran untuk meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan keluarga. Sekolah Perempuan dapat menjadi pemimpin

perubahan sosial di lingkungan mereka, hal ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kesetaraan gender (UN Women, 2021). Inisiatif Sekolah Perempuan didasarkan pada kesadaran akan adanya hambatan yang dialami perempuan untuk mengakses layanan yang disebabkan persoalan struktur dan budaya patriarki, seperti pembatasan pendidikan perempuan, kemiskinan, diskriminasi, kekerasan dan beban domestik perempuan (Nur, 2019).

Faktor yang berpengaruh pada rendahnya kesehatan reproduksi perempuan adalah kemiskinan, Pendidikan yang rendah, tidak mendapatkan akses informasi kesehatan yang penting, tidak memiliki kendali atas hak-haknya, dan posisi perempuan yang tidak setara karena dianggap sebagai warga kelas kedua (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2018).

Melalui Sekolah Perempuan diharapkan peserta mampu berpikir kritis, memahami hak-haknya termasuk hak reproduksi, pengetahuan dan keberdayaan perempuan akan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat untuk diri dan keluarganya, ketidaksetaraan gender dan rendahnya pengetahuan sertaketerampilan merupakan faktor yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan pada perempuan (Bayrami & Najar, 2020). Melalui Sekolah Perempuan, para peserta memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi agen perubahan bagi lingkungannya, mereka berharap dapat berkontribusi nyata bagi pencegahan kekerasan pada perempuan, meningkatkan kualitas perempuan dan menekan angka perkawinan anak. Semangat ini didasarkan pada kesadaran mengenai berbagai dampak negatif dari ketidakberdayaan dan perkawinan anak bagi kesehatan perempuan (Mulyaningsih, Dwi, et al., 2024).

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini juga merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak perempuan, untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk berkumpul dan berpartisipasi. Respon positif dari para peserta adalah mereka memiliki wadah untuk berbagi cerita, berbagi pengetahuan dan berbagi pendapat, sehingga melalui Sekolah Perempuan ini juga meningkatkan soft skills perempuan di desa Balongbesuk. Pemberdayaan kesehatan reproduksi perempuan merupakan proses memberikan kemampuan, akses, dan kontrol kepada perempuan untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka. Ini mencakup pendidikan, layanan kesehatan, kebijakan, dan program yang mendukung perempuan dalam menjaga kesehatannya, mencegah risiko kesehatan reproduksi, serta memperjuangkan hak-haknya atas kesehatan seksual dan reproduksi.

Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, mengurangi ketidaksetaraan gender, dan memastikan mereka memiliki informasi dan sumber daya yang memadai untuk membuat keputusan yang informasional dan mandiri

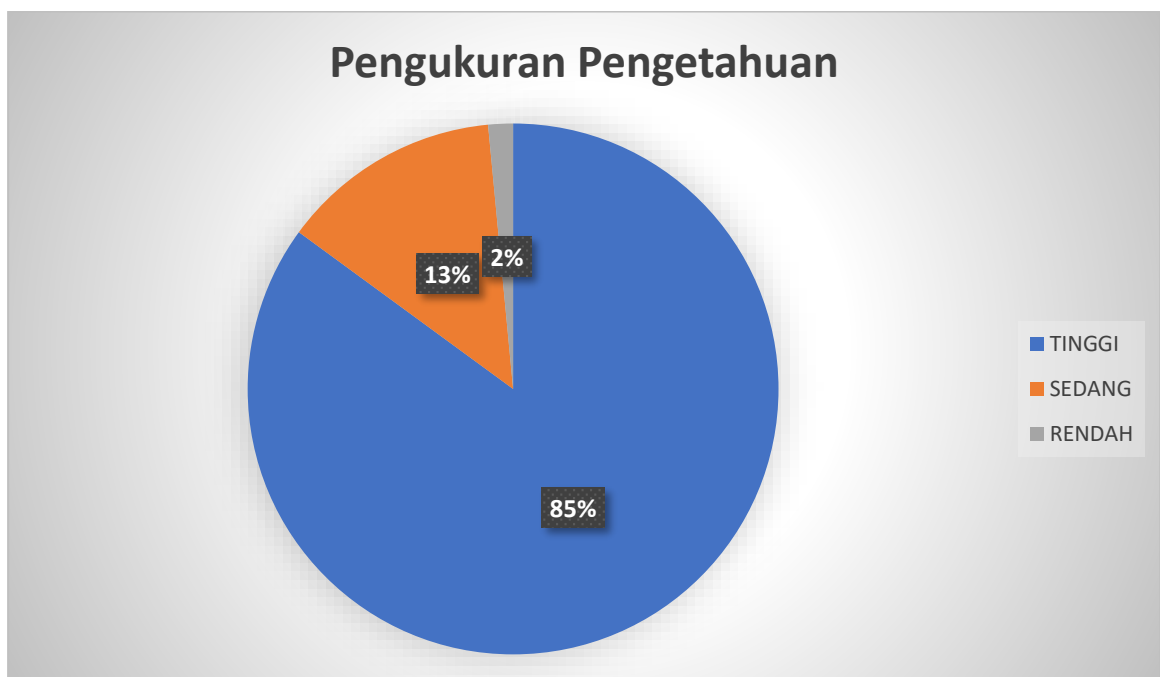
Terlaksananya Sekolah perempuan yang melibatkan banyak pihak tidak lepas dari dukungan pemerintah Desa Balongbesuk yang berkomitmen untuk menjalankan program ini dengan baik, mereka yang tergabung dalam Sekolah Perempuan menunjukkan motivasi yang tinggi dalam mengikuti setiap pertemuan. Animo Masyarakat yang tinggi ini merupakan poin penting bagi keberlanjutan suatu program maupun menyebarkan informasi kepada khalayak lainnya. Melalui kegiatan ini, mereka berperan sebagai agen yang dapat menyampaikan informasi kepada Masyarakat lain.

Setelah melalui serangkaian kegiatan, dilakukan evaluasi dalam bentuk pengisian kuesioner oleh para peserta Sekolah Perempuan, evaluasi ini mengukur pengetahuan dan sikap untuk mengukur seberapa jauh tujuan dari Sekolah Perempuan dapat dicapai. Berikut ini adalah pengukuran sikap, yang terdiri dari 25 pernyataan yang harus diisi

oleh peserta. Hasil dari pengukuran sikap tersebut adalah diketahui jumlah peserta yang memiliki sikap positif dan sikap negatif.



Grafik 1: Hasil Pengukuran Sikap



Grafik 2 Hasil Pengukuran Pengetahuan

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa pengetahuan peserta hanya sebagian kecil saja yang memiliki kategori kurang, sedangkan sebanyak 85% memiliki pengetahuan tinggi dan 13% memiliki pengetahuan sedang. Hal ini sejalan dengan hasil pengukuran sikap yang menunjukkan sebagian besar memiliki sikap positif. Pengukuran Sikap dan Pengetahuan dilakukan setelah peserta mendapatkan materi mengenai Hak-Hak Reproduksi dan Persiapan Kehamilan Sehat. Peserta berpartisipasi

aktif dengan menyampaikan pengalaman yang pernah ditemui, maupun memberikan pendapat selama proses pembelajaran di kelas Sekolah Perempuan. Fasilitator Sekolah Perempuan memberikan evaluasi pengetahuan dan sikap untuk mendapatkan ukuran yang obyektif. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan:



Gambar 1: Pemberian Materi “Hak-Hak Reproduksi”



Gambar 2. Pemberian Materi “Persiapan Kehamilan Sehat”

KESIMPULAN

Hasil pengabdian masyarakat untuk mengevaluasi topik Hak-Hak Reproduksi dan Persiapan Kehamilan Sehat menunjukkan Sikap Positif para peserta jauh lebih banyak dibanding yang Sikap Negatif, adanya sikap positif ini menunjukkan bahwa Sekolah Perempuan dapat menjadi upaya peningkatan pemberdayaan kesehatan reproduksi perempuan. Kegiatan Sekolah Perempuan dapat menjadi cara efektif agar perempuan mendapatkan akses pengetahuan, meningkatkan keberdayaan, kesetaraan

dan memberi ruang bagi peserta untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan.

Adapun kekurangannya adalah jumlah pertemuan yang terbatas untuk topik kesehatan reproduksi mengingat upaya pemberdayaan perempuan mencakup banyak aspek. Perlu dilakukan pengembangan dalam bentuk menambah jumlah pertemuan dan metode yang beragam agar dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayrami, R., & Najar, A. V. (2020). The Factors Contributing to Domestic Violence from the Perspective of Iranian Couples: A Qualitative Study. *Journal of Qualitative Research in Health Science*, 9(2), 133–144. <https://doi.org/10.22062/JQR.2020.91458>
- Kemenpppa. (2019). Laporan Periodik CEDAW ke-8 Indonesia. *Kajian Sosio-Legal*, 246. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/1d669-translasi-cedaw-report_indo.pdf
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2018). Pemetaan permasalahan hak atas kesehatan seksual & reproduksi pada perempuan anak, buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia serta Minoritas. In *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia* (p. 18).
- KPPPA. (2022). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, xviii + 178.
- Kusmiran, E. (2012). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Salemba Medika.
- Mulyaningsih, E. A., Argaheni, N. B., & Juwita, S. (2024). Artificial Intelligence in Adolescent Sexually Transmitted Infections. *Academic Seminar and International Conference*, 1(1 SE-ASIC Conference Abstracts). <https://doi.org/10.53893/asic.v1i1.277>
- Mulyaningsih, E. A., Dwi, I., Nurhaeni, A., & Lestari, A. (2024). *Reproductive Health Impacts of Child Marriage*. 1(1), 188–192.
- Mulyaningsih, E. A., Juwita, S., Argaheni, N. B., & Fitrah, N. (2023). *The Impact of Reproductive Health on Female Victims of Violence by Partners*. 7(July), 21–26.
- Nur, S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *An-Nisa*, 10(1), 99–111. <https://doi.org/10.30863/annisa.v10i1.388>
- UN Women. (2021). *Policies and Practice: a Guide To Gender-Responsive Implementation of the Global Compact for Migration*.
- Zakaria, M., Karim, F., Mazumder, S., Cheng, F., & ... (2020). Knowledge on, attitude towards, and practice of sexual and reproductive health among older adolescent girls in Bangladesh: An institution-based cross-sectional.